

# Kesenjangan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia: Analisis Ketimpangan Sumber Daya, Tata Kelola, dan Daya Saing Perguruan Tinggi

WirDatul Aini<sup>1</sup>, Aqimi Dinana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

## Abstract

Pendidikan tinggi atau dikti di Indonesia pada dasarnya masih perlu berbenah. Jika dibandingkan dengan pendidikan tinggi di luar negeri, di Indonesia masih banyak terdapat persoalan-persoalan yang perlu diperhatikan. Tidak hanya itu, persoalan-persoalan tersebut juga sudah seharusnya memiliki solusi agar pendidikan tinggi di Indonesia bisa semakin maju ke depannya. Ada beberapa persoalan yang menjadikan pendidikan tinggi di Indonesia harus membenahi diri. Kesenjangan terjadi ketika terdapat jarak antara kenyataan yang ada dengan harapan. Perguruan tinggi berlomba membangun kurikulum yang mampu menjawab tantangan dunia kerja, sehingga para lulusannya secara cepat dapat terserap di dunia kerja setelah lulus menempuh Pendidikan serta kesenjangan tersebut dapat diminimalisir.

**Keywords:** Kesenjangan, fungsi, Pendidikan tinggi

## Citation:

Aini, W. & Dinana, A. (2025). Kesenjangan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia: Analisis Ketimpangan Sumber Daya, Tata Kelola, dan Daya Saing Perguruan Tinggi. *Journal of Educational Review and Cultural Studies*, 3(1), 1-19. <https://doi.org/10.61540/jercs.v3i1.133>

## Article History:

Received 27 March 2025

Accepted 15 April 2025

## Correspondence:

WirDatul Aini,

[WirDatul\\_aini@stainkepri.ac.id](mailto:WirDatul_aini@stainkepri.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pengelolaan pendidikan, baik pada lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah maupun swasta, pada dasarnya memiliki kesamaan mendasar sebagai penyedia layanan publik. Sebagai konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan tinggi menuntut adanya akuntabilitas publik, transparansi, serta tata kelola yang baik (good governance). Dalam konteks ini, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai motor

---

penggerak pengembangan inovasi, kreativitas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan.

Di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, perguruan tinggi dituntut untuk terus melakukan reformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas tata kelola agar mampu menjaga relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Kualitas pendidikan tinggi seringkali diukur melalui berbagai indikator kinerja, termasuk hasil pemeringkatan perguruan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah melalui indikator akademik dan non-akademik. Namun demikian, capaian kinerja tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pendidikan tinggi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi adalah kesenjangan mutu pendidikan tinggi, yang ditandai dengan adanya perbedaan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas lulusan, tetapi juga mencakup aspek sumber daya, tata kelola, akses, serta daya saing antar perguruan tinggi. Di satu sisi, perguruan tinggi berupaya merancang kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan dunia kerja agar lulusan dapat terserap dengan cepat. Namun di sisi lain, tidak semua perguruan tinggi memiliki kapasitas yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara optimal.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti distribusi sumber daya yang tidak merata, kualitas tenaga pendidik, infrastruktur pendidikan, serta efektivitas tata kelola institusi. Selain itu, tekanan terhadap peningkatan kompetensi lulusan, baik dalam aspek hard skills maupun soft skills, semakin memperlihatkan adanya perbedaan kualitas antar institusi. Kondisi ini berimplikasi pada ketimpangan daya saing lulusan di pasar kerja serta memperlebar disparitas antar wilayah.

Meskipun isu kesenjangan pendidikan tinggi telah banyak dibahas, sebagian besar kajian masih bersifat parsial dan belum memberikan sintesis komprehensif yang mengintegrasikan berbagai faktor penyebab dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang lebih sistematis untuk memahami hubungan antara faktor-faktor tersebut secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui pendekatan konseptual berbasis studi literatur, dengan menitikberatkan pada aspek sumber daya, tata kelola, dan daya saing perguruan tinggi. Selain itu, artikel ini juga berupaya merumuskan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami dan mengurangi ketimpangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain artikel konseptual berbasis studi literatur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan terkait pendidikan tinggi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang relevan menggunakan kata kunci seperti kesenjangan pendidikan tinggi, higher education inequality, dan governance in higher education. Literatur yang dipilih mempertimbangkan relevansi topik dan kredibilitas sumber. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis konsep utama yang berkaitan dengan sumber daya, tata kelola, dan daya saing perguruan tinggi. Hasil analisis digunakan untuk membangun pemahaman konseptual mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pendidikan Tinggi di lingkungan Kemenristek Dikti**

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu tugas dari Kemenristekdikti adalah menjalankan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi. Kedudukan, tugas dan fungsi dari kementerian dalam pemerintahan senantiasa mengalami perubahan mengikuti keputusan Presiden. Setiap perubahan detail teknis dari kementerian secara legal tertuang di dalam Peraturan Presiden.

Tanggung jawab pemerintah RI atas pendidikan tinggi (Dikti) sebelumnya masih dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak Joko Widodo menduduki jabatan sebagai Presiden RI pada 2014, “PR” di bidang pendidikan tinggi ini dipisahkan. Lalu, dibentuklah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) dengan M. Nasir sebagai menterinya. Peleburan ini bertujuan agar riset baik yang berhubungan dengan teknologi, riset sosial, pertanian, kemaritiman, itu bisa diaplikasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, petani, nelayan, dan usaha mikro. Hal ini karena riset belum benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Kegiatan riset dilakukan sendiri-sendiri oleh setiap lembaga dan kementerian sehingga tidak satu padu.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset ini diharapkan dapat menjadi pusat bagi riset nasional. Dengan demikian, riset akan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemenristek Dikti sudah aktif sampai saat ini dan terus berperan dalam pengembangan riset dan teknologi, serta meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Harapannya, Kemenristek Dikti bisa menjalankan perannya secara optimal. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain mendorong dosen atau civitas academica lainnya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, baik melalui pemberian poin kredit kinerja secara terukur, beasiswa, dan dana penelitian

## **2. Pendidikan tinggi di lingkungan Kementrian lainnya**

Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya. Salah satu upaya optimalisasi serta akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan adalah perlunya kebijakan pembangunan kesehatan yang dirumuskan mengacu pada hasil penelitian atau kajian yang bersifat mendasar, luas dan berjangkau ke depan yang berbasis bukti. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 42 ayat (1) menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi (TI) kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) adalah perguruan tinggi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) memiliki kontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan salah satunya adalah melakukan penelitian bidang kesehatan.

Poltekkes Kemenkes sebagai perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem. Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 yang menyebutkan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Seiring dengan hal tersebut pada pasal 85 ayat (6) Pemerintah telah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana bantuan operasional.

Perguruan Tinggi Negeri, dalam hal ini Poltekkes telah mendapatkan alokasi program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang langsung diberikan dan dikelola di masing-masing Poltekkes. BOPTN diberikan tidak hanya membantu meringankan beban operasional dari Poltekkes tetapi juga meningkatkan anggaran penelitian Poltekkes.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi penelitian salah satunya adalah dengan adanya perencanaan sektor penelitian jangka panjang melalui Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017-2045. Dijelaskan bahwa yang menjadi fokus Prioritas Riset Nasional (PRN) salah satunya adalah kesehatan. Bidang riset kesehatan mencakup seluruh bidang dan proses untuk mendukung peningkatan harapan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat. Bidang riset kesehatan meliputi penelitian dan pengembangan untuk solusi masalah kesehatan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan manufaktur alat kesehatan. Dengan adanya perkembangan regulasi terkait penelitian di Indonesia, diharapkan dosen di Poltekkes dapat lebih meningkatkan kualitas penelitian dan memenuhi target iuran penelitian. Kegiatan penelitian memberi kesempatan kepada dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes untuk meningkatkan kompetensi risetnya agar mampu berkiprah dan mendapatkan pengakuan pada tataran nasional dan internasional serta menerapkan hasil riset di masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan juga terwujudnya atmosfer riset yang baik dan budaya riset yang kokoh, berkelanjutan dan berkualitas.

---

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang secara teknis fungsional membina Poltekkes seluruh Indonesia dalam hal Pelaksanaan Penelitian menetapkan 2 (dua) kategori dengan 7 skema penelitian yang dikembangkan dari skema penelitian yang terdapat pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII yang telah ditetapkan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pedoman pelaksanaan ini juga mengacu pada standar penelitian berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dari penjelasan di atas, ada beberapa kesenjangan fungsi yang terjadi di politeknik Kesehatan, antara lain :

a. Rendahnya kualitas sarana sekolah;

Sarana sebagai salah satu penunjang kebutuhan keberlangsungan Pendidikan menjadi bagian penting, seperti Gedung sekolah, media belajar, fasilitas perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Sarana pembelajaran menjadi terpuruk atau rendah terutama bagi penduduk yang di daerah terpencil/pelosok. Jika dibandingkan dengan dengan kualitas fisik yang berada di kota-kota besar, mereka memiliki fasilitasfasilitas yang memadai, mulai dengan pembangunan gedung, media belajar yang lengkap, dan sebagainya.

b. Rendahnya kualitas guru;

Kualitas pendidikan dapat ditentukan dengan sumber daya manusia (pengajar/guru/dosen) yang memiliki kompetensi dalam menjalankan Pendidikan kepada peserta didik, tenaga pengajar (guru) menjadi harapan bagi peserta didik untuk dapat mentransfer ilmu pengetahuan secara baik. Guru yang mempunyai pengalaman dan kemampuan yang mumpuni maka akan dapat menciptakan generasi muda menjadi cerdas dan berkualitas baik. Keadaan ini menjadi memprihatinkan ketika dibandingkan dengan daerah terpencil, dimana ketersediaan guru atau tenaga pengajar masih jauh dari kebutuhan yang seharusnya.

c. Faktor infrastruktur;

Infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Aspek infrastruktur yang berkaitan dengan tercapainya pendidikan tidak hanya jumlah dan kondisi fisik sekolah, akan tetapi mengenai aksesibilitas menuju lokasi sekolah yang memberikan kemudahan bagi peserta didik. Hal ini menjadi bertolak

belakang dengan daerah yang berada di pelosok, sehingga akses menuju sekolah sulit untuk ditempuh dan cenderung menghambat kelancaran proses belajar dari peserta didik.

d. Jumlah dan kualitas buku (referensi);

Buku atau referensi merupakan unsur yang mampu membantu peserta didik dan tenaga pengajar untuk memudahkan proses belajar mengajar. Ketersediaan dan kualitas buku menjadi penting untuk keberlangsungan pendidikan, sebagaimana disebutkan bahwa setiap satuan Pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

e. Mahalnya biaya pendidikan;

Biaya pendidikan menjadi acuan dalam mendapatkan pendidikan dengan kualitas masing-masing, seperti biaya sekolah yang mahal akan mendapatkan banyak fasilitas yang sangat memadai sebagai penunjang, sebaliknya biaya yang murah hanya terdapat fasilitas penunjang seadanya. Adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan keringanan biaya khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun realitasnya, selama ini belum dapat dimaksimalkan anggaran tersebut dan belum ada pemerataannya.

f. Standarisasi Pendidikan yakni Sekolah

Berstandar Nasional (SBN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI); Faktor ini menjadi sorotan yang berdampak pada kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Adanya pengelompokan sekolah tersebut berdampak pada mutu dan pelayanan yang diberikan, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus berdasar pada landasan konstitusional bahwa pendidikan adalah hak warga negara, artinya pemenuhan hak pendidikan tersebut harusnya sama tidak ada perbedaan satu dengan lainnya.

Kebijakan pemerintah mengenai RSBI justru menciptakan kesenjangan yang mencolok mengenai mutu dan pelayanan pendidikan. Pada dasarnya mutu Pendidikan yang baik bukan hanya untuk sekelompok orang, melainkan untuk semua anak bangsa. Berdasar pada faktor-faktor diatas mengenai kesenjangan sosial terhadap pendidikan, maka perlu keseriusan pemerintah dan peran serta masyarakat untuk bersatu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan kebutuhan yang menunjang proses

pendidikan dari wilayah perkotaan hingga sampai daerah-daerah yang terpencil atau pelosok. Peran masyarakat diperlukan untuk memberikan dorongan kepada antar warga negara bahwa Pendidikan mempunyai arti penting dan tujuan yang mulia khususnya menjadikan bangsa Indonesia mempunyai kualitas yang baik di mata dunia. Kesenjangan sosial berkaitan dengan pendidikan harus mampu diminimalisir bahkan diselesaikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat.

### **3. Faktor-faktor penyebab kesenjangan fungsi Pendidikan tinggi**

Berbicara tentang pendidikan di Negara Indonesia, bukti menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pendidikan di Negara Indonesia. Permasalahan utama pendidikan di Negara Indonesia adalah adanya ketimpangan kualitas pendidikan di Jawa dan di luar Jawa. Pendidikan di Jawa lebih baik dibandingkan pendidikan di luar Jawa, permasalahan tersebut juga berlaku pada tingkat Perguruan Tinggi. Permasalahan ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sayang sampai sekarang belum ada solusinya.

Perbedaan kualitas Perguruan Tinggi Jawa dan luar Jawa harus segera diatasi, namun sebelum mengatasi permasalahan ini. Perlu adanya pemahaman dan pengetahuan terkait penyebab kualitas Perguruan Tinggi Jawa dan luar Jawa berbeda. Berikut ini faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya perbedaan kualitas antara Perguruan Tinggi Jawa dan luar Jawa, antara lain :

#### **a. Lebih Mementingkan Kuantitas Dibandingkan Kualitas**

Perguruan Tinggi saat ini cenderung bukan sarana pendidikan, namun malah merambah menjadi sarana bisnis. Perguruan Tinggi saat ini banyak yang beralih fungsi. Fungsi utama yang seharusnya menciptakan mahasiswa yang nantinya ketika lulus akan memiliki kesiapan untuk bersaing di dunia kerja, tetapi malah berubah dengan budaya mengumpulkan sebanyak-banyaknya mahasiswa untuk keuntungan bisnis semata.

Dahulu mahasiswa benar-benar diuji untuk mendapatkan nilai di lembar ijazah, namun saat ini banyak mahasiswa yang dengan mudah mendapatkan nilai di lembar ijazah. Bahkan nilai yang didapatkan jauh berbanding terbalik dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa.

Permasalahan ini sebenarnya hampir terjadi di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. Namun jika dibandingkan terkait kualitas pendidikannya, jelas Perguruan Tinggi di pulau Jawa

---

lebih baik dibandingkan dengan Perguruan Tinggi luar Jawa. Contoh nyata saja, Perguruan Tinggi seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi berkualitas berada di daerah pulau Jawa.

b. Kurangnya Guru Besar, Terutama Pada Perguruan Tinggi Luar Jawa

Guru besar atau yang lebih sering disebut profesor, jumlah guru besar di Negara Indonesia bisa dikatakan masih kurang, terutama pada Perguruan Tinggi yang berada di luar Jawa (duniadosen.com, 2016).

Padahal fungsi guru besar pada pendidikan Negara Indonesia sangatlah penting. Pada dasarnya tenaga dari guru besar sangatlah dibutuhkan, sebab tenaga guru besar sangat berguna untuk membantu melaksanakan agenda besar penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tenaga inilah yang benar-benar dibutuhkan untuk perbaikan pendidikan terutama pada tingkat Perguruan Tinggi di Negara Indonesia.

c. Adanya Permasalahan Krisis Dosen di Luar Jawa

Negara Indonesia masih memiliki permasalahan yaitu masih kurangnya tenaga pengajar (dosen) yang memiliki kualitas baik. Berbicara tentang dosen, dosen merupakan pemegang peranan utama untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas. Disinilah permasalahan Perguruan Tinggi luar Jawa, banyak Perguruan Tinggi luar Jawa yang mengalami krisis dosen. Banyak Perguruan Tinggi luar Jawa yang kekurangan dosen berkualitas. Contoh nyata adalah di luar Jawa masih banyak sekali dosen yang menempuh pendidikan terakhir S1, sungguh ironis sekali mengetahui akan hal tersebut. Seharusnya dosen minimal menempuh pendidikan terakhir S2, namun lebih baik lagi kalau dosen pendidikan terakhirnya S3.

Setelah mengetahui beberapa faktor penyebab ketimpangan fungsi Pendidikan tinggi yang terjadi. Berikut ini beberapa bentuk ketimpangan yang terjadi dalam hal Kualitas Pendidikan Perguruan Tinggi :

d. Fasilitas Perguruan Tinggi di Luar Jawa Masih Kurang Memadai

Perguruan Tinggi luar Jawa juga memiliki permasalahan terkait fasilitas yang dimiliki, fasilitas Perguruan Tinggi luar Jawa bisa dikatakan masih kurang memadai. Padahal fasilitas pada Perguruan Tinggi merupakan suatu bagian penting yang mampu menunjang kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa. Permasalahan tersebut yang membuat dosen lebih

---

memilih mengajar di Perguruan Tinggi yang ada di pulau Jawa dari pada mengajar di Perguruan Tinggi luar Jawa. Hal tersebut juga berlaku pada banyaknya calon mahasiswa yang akan memilih pendidikan di pulau Jawa. Karena calon mahasiswa yakin dengan fasilitas yang lebih memadai akan lebih menunjang peningkatan kemampuan dan keahlian mereka. Begitu pun dengan para dosen yang akan banyak memilih mengajar di pulau Jawa karena mengajar lebih optimal dan memberikan kenyamanan dibandingkan mengajar di luar pulau Jawa.

Setelah mengetahui beberapa faktor penyebab ketimpangan fungsi Pendidikan tinggi yang terjadi. Berikut ini beberapa bentuk ketimpangan yang terjadi dalam hal Kualitas Pendidikan Perguruan Tinggi:

a. Peringkat Perguruan Tinggi di Negara Indonesia

Bukti nyata adalah jika melihat pada klasterisasi Perguruan Tinggi Negeri versi Kemenristek Dikti tahun 2019. Menunjukkan hasil bahwa Perguruan Tinggi terbaik di Negara Indonesia rata-rata berasal dari pulau Jawa. 10 besar peringkat teratas Perguruan Tinggi, 9 Perguruan Tinggi berasal dari pulau Jawa dan hanya 1 Perguruan Tinggi yang berasal dari luar Jawa (ristekbrin.go.id , 2019). Perguruan Tinggi dari luar Jawa yang mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi dari pulau Jawa adalah Universitas Hasanuddin Makassar. Sungguh sangat disayangkan teman-teman jika melihat banyaknya Perguruan Tinggi yang berasal dari luar Jawa, namun yang bisa masuk 10 besar Perguruan Tinggi terbaik di Negara Indonesia hanya ada 1 Perguruan Tinggi saja.

b. Akreditasi dari Perguruan Tinggi Luar Jawa

Akreditasi menjadi bukti perbedaan kualitas dari setiap Perguruan Tinggi. Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan oleh pihak di luar lembaga yang independen. Terdapat perbandingan yang cukup besar terkait Akreditasi Perguruan Tinggi Jawa dan luar Jawa. Pada pulau Jawa, terdapat banyak Perguruan Tinggi yang memiliki Akreditasi A. Sedangkan di luar Jawa dengan banyaknya Perguruan Tinggi, hanya ada beberapa Perguruan Tinggi yang memiliki Akreditasi A. Perguruan Tinggi yang memiliki Akreditasi A di luar Jawa antara lain adalah Universitas Hasanuddin, Universitas Lampung, Universitas Sriwijaya, Universitas Andalas, Universitas Syiah Kuala Aceh (rencanamu.id, 2017).

### c. Pencapaian Ketika Berpartisipasi Pada Kompetisi Ilmiah

Kualitas dari perguruan Tinggi juga dapat dilihat dari hasil ketika mengikuti kompetisi ilmiah. Perguruan Tinggi pulau Jawa pada ajang kompetisi ilmiah menunjukkan hasil pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan Perguruan Tinggi luar Jawa. Pencapaian tersebut membuktikan bahwa kualitas mahasiswa Perguruan Tinggi pulau Jawa dan luar Jawa sangat berbeda. Mahasiswa Perguruan Tinggi pulau Jawa lebih unggul dibandingkan dengan mahasiswa Perguruan Tinggi luar Jawa. Contohnya pada kegiatan Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS), jika dilihat dari jangka waktu 10 tahun terakhir. Sejak tahun 2009 sampai 2019, juara umum dari PIMNAS selalu di raih oleh Perguruan Tinggi dari pulau Jawa. Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada silih berganti meraih prestasi juara umum. Sedangkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya hanya mampu sekali meraih prestasi juara umum. Lebih parahnya Perguruan Tinggi yang berasal dari luar Jawa malah tidak mampu berbicara banyak di kegiatan PIMNAS. Perguruan Tinggi luar Jawa pada 10 tahun terakhir belum pernah meraih juara umum pada kegiatan PIMNAS (TrenKampus, 2019).

### d. Karakteristik Lulusan Ketika Memasuki Dunia Kerja

Selanjutnya adalah adanya perbedaan karakteristik di dunia kerja pada lulusan Perguruan Tinggi pulau Jawa dengan luar Jawa. Lulusan Perguruan Tinggi Pulau Jawa lebih ulet dan bersedia untuk lembur guna mensukseskan tujuan perusahaan, sedangkan lulusan Perguruan Tinggi dari luar Jawa masih memerhatikan batasan antara waktu kerja dan waktu libur (Careernews, 2014).

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan mutu pendidikan yang diberikan Perguruan Tinggi dari pulau Jawa dan dari luar Jawa. Perbedaan mutu pendidikan tersebut yang menciptakan adanya perbedaan pola pikir antara lulusan Perguruan Tinggi pulau Jawa dan Perguruan Tinggi luar Jawa. Contohnya seperti mahasiswa dari luar pulau Jawa yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi pulau Jawa kurang lebih akan memiliki pola pikir seperti mahasiswa asli pulau Jawa.

### e. Hasil Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Hasil tes CPNS juga bisa menjadi bukti kualitas dari lulusan Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil tes CPNS menunjukkan hasil bahwa mahasiswa Perguruan Tinggi luar Jawa masih jauh dari kata berkualitas. Hasil ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan Perguruan

---

Tinggi luar Jawa harus segera ditingkatkan dengan harapan agar tidak ada lagi ketimpangan antara Perguruan Tinggi pulau Jawa dan luar Jawa.

Pada hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS 2017, peserta yang lulus didominasi lulusan Perguruan Tinggi Pulau Jawa. Daerah Jogjakarta tingkat kelulusan CPNS mencapai 24 persen, sedangkan di Sumbar hanya berkisar 4 persen, Aceh 3 persen dan Papua 1 persen. Jika dirata-ratakan, tingkat kelulusan ujian TKD di pulau Jawa sekitar 14 persen, Sumatera 4 persen dan kawasan timur 2-3 persen. Hasil ini benar-benar menjadi bukti bahwa terdapat perbedaan mutu pendidikan Perguruan Tinggi pulau Jawa dan luar Jawa (JawaPos.com, 2017).

#### **4. Solusi Mengatasi Ketimpangan Kualitas Pendidikan**

Ketika adanya permasalahan, pastinya dibutuhkan suatu solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan. Begitu juga akan hal ini, permasalahan ketimpangan kualitas pendidikan antara Perguruan Tinggi pulau Jawa dan luar Jawa juga membutuhkan solusi sehingga harapannya akan ada pembenahan pada Perguruan Tinggi luar Jawa. Berikut ini solusi untuk mengurangi permasalahan ketimpangan kualitas Perguruan Tinggi Jawa dan luar Jawa :

##### **a. Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi**

Perguruan Tinggi perlu kembali ke fungsi utama yaitu sebagai sarana pendidikan, bukan menjadi sarana bisnis. Perguruan Tinggi di luar Jawa perlu meningkatkan kualitas guna mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi pulau Jawa. Cara alternatif meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi menurut adalah dengan meningkatkan standar kurikulum yang dimiliki, pengupayaan peningkatan kemampuan mahasiswa baik dibidang akademik ataupun dibidang non akademik, meningkatkan standar penilaian kepada mahasiswa, meminta dosen untuk terus aktif melakukan penelitian yang bermutu, menyarankan mahasiswa untuk aktif melakukan penelitian dan melakukan pengabdian ke masyarakat.

Cara tersebut akan mampu meningkatkan kualitas dari Perguruan Tinggi luar Jawa. Namun harus diimbangi dengan satu hal yaitu budaya beberapa Perguruan Tinggi yang memprioritaskan bisnis dibanding pendidikan harus dirubah. Perguruan Tinggi sudah seharusnya memprioritaskan standar pendidikan yang dimiliki, bukan hanya memperhatikan strategi bisnis yang dijalankan guna mendapatkan keuntungan.

##### **b. Meningkatkan Jumlah Guru Besar Terutama di Perguruan Tinggi Luar Jawa**

Guru besar memang memiliki peranan penting untuk mendukung tercapainya perbaikan pendidikan Perguruan Tinggi di luar Jawa. Namun saat ini sungguh disayangkan teman-teman karena masih kurangnya guru besar di Negara Indonesia, terutama di Perguruan Tinggi luar Jawa. Karena masih terdapat kekurangan maka perlu adanya peningkatan guru besar terutama di Perguruan Tinggi luar Jawa.

Cara meningkatkan jumlah guru besar bisa dikatakan tidak mudah. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan jabatan akademik tersebut. Menurut Parmenpan 46 th 2013 (pasal 26 ayat 3) syarat untuk mendapat jabatan guru besar adalah memiliki ijazah doktor (S3), paling singkat 3 tahun setelah mendapat ijazah doktor, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Internasional bereputasi, memiliki pengalaman kerja sebagai dosen sekitar 10 tahun (hangtuh.ac.id, 2017).

Sulitnya mendapatkan jabatan guru besar, sebenarnya coba untuk diatasi oleh Kemristekdikti. Kemristekdikti menyadari bahwa memang dosen yang menyandang jabatan guru besar di Negara Indonesia masih sangat kurang. Jumlah guru besar hanya sekitar 6.000 orang, padahal idealnya guru besar berjumlah 2.200 orang (tirto.id, 2017).

Beberapa cara untuk meningkatkan jumlah guru besar di Negara Indonesia, yang pertama adalah lebih mempermudah dan mempercepat prosedur pendaftaran jabatan guru besar, prosedur yang terlalu rumit dan susah membuat banyak dosen merasa ragu untuk mengurus persyaratan pendaftaran jabatan guru besar.

Selain itu cara kedua yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan membuat program beasiswa yang ditujukan kepada dosen yang memiliki prestasi baik. Pemerintah bisa memberikan beasiswa kepada dosen yang bergelar Magister (S2) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor (S3). Pemerintah juga dapat membuat program beasiswa kepada dosen lulusan Sarjana (S1) untuk menempuh pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) secara gratis.

Program ini ketika berjalan dengan baik akan membuat penerima beasiswa lebih termotivasi untuk mencapai jabatan akademik guru besar. Namun yang harus diingat oleh pemerintah adalah program beasiswa ini harus dilakukan secara berkesinambungan, program ini tidak boleh dijalankan sekali saja kalau memang tujuan utamanya meningkatkan jumlah guru besar di Negara Indonesia.

---

Strategi ketiga yang dapat dilakukan pemerintah adalah ikut membantu membiayai karya ilmiah dosen yang digunakan untuk mendapatkan jabatan guru besar. Kita tahu sendiri bahwa untuk mendapatkan jabatan guru besar terdapat persyaratan karya ilmiah yang harus dipublikasikan pada jurnal Internasional bereputasi. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Internasional bereputasi pastinya bukan karya ilmiah yang sembarangan. Pastinya penelitian yang dilakukan sangat sulit dan berbeda dengan penelitian-penelitian sekelas Sarjana ataupun Magister, biaya penelitian yang dikeluarkan pastinya juga lebih besar. Pemerintah disini dapat turut andil mendukung keberhasilan penelitian dengan cara membantu membiayai penelitian yang dilakukan dosen untuk mendapatkan jabatan akademik guru besar.

### c. Meningkatkan Kualitas Dosen Pada Perguruan Tinggi Luar Jawa

Pada Perguruan Tinggi luar Jawa masih memiliki permasalahan krisis dosen berkualitas. Banyak yang menyarankan cara mengatasi permasalahan dengan mengirimkan dosen dari Perguruan Tinggi Jawa untuk mengajar di Perguruan Tinggi luar Jawa. Terdapat juga yang menyarankan untuk menggunakan metode pembelajaran dengan format PJJ (Pendidikan Jarak Jauh). Sehingga membuat dosen Perguruan Tinggi pulau Jawa ketika memberikan pembelajaran kepada mahasiswa Perguruan Tinggi luar Jawa tidak perlu jauh-jauh untuk datang ketempat.

Alternatif cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mengirimkan beberapa dosen Perguruan Tinggi luar Jawa ke Perguruan Tinggi Jawa dalam rangka untuk mempelajari metode pembelajaran dosen Perguruan Tinggi Jawa, cara ini dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas dari dosen Perguruan Tinggi luar Jawa.

Cara kedua adalah memberikan beasiswa pendidikan Magister kepada dosen pendidikan terakhir Sarjana. Sudah seharusnya dosen minimal memiliki pendidikan terakhir Magister.

Pemerintah perlu membuat program beasiswa kepada dosen pendidikan terakhir Sarjana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister. Program ini dapat ditujukan tidak kepada semua dosen, hanya dosen yang berprestasilah yang bisa mendapatkan bantuan beasiswa ini. Ketika dosen mendapatkan beasiswa, pastinya dosen akan senang hati untuk menerima beasiswa guna meningkatkan kualitas yang dimilikinya.

Berbicara tentang beasiswa pendidikan, membuat saya memiliki rencana lagi, cara lain yang dapat meningkatkan kualitas dari dosen. Kenapa dosen Perguruan Tinggi luar Jawa tidak diberikan program beasiswa pendidikan ke Perguruan Tinggi luar Negeri. Memang memerlukan

biaya yang besar terkait program beasiswa ini, namun ketika menempuh pendidikan disana. Dosen dapat meniru metode pembelajaran yang diberikan, dosen juga dapat meniru budaya dari Perguruan Tinggi luar Negeri. Pendidikan pada Perguruan Tinggi luar Negeri pastinya akan meningkatkan kemampuan dan kualitas dari dosen.

Sebenarnya masih terdapat cara lain untuk meningkatkan kualitas dari dosen seperti melakukan penelitian, selalu mengupgrade dan memperdalam ilmu, selalu aktif dan kreatif baik di dalam kampus maupun di luar kampus, melakukan pengabdian kepada masyarakat, melakukan pendekatan dengan mahasiswa dan lingkungan kampus (sevima.com, 2020)

#### d. Memperbaiki dan Meningkatkan Fasilitas Perguruan Tinggi Luar Jawa

Perguruan Tinggi luar Jawa masih memiliki permasalahan terkait fasilitas yang dimiliki. Disini diperlukan solusi guna memperbaiki dan meningkatkan fasilitas dari Perguruan Tinggi luar Jawa dalam rangka mendukung kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa. Tenang teman-teman, disini saya memiliki beberapa solusi terkait fasilitas apa saja yang perlu diperbaiki pada Perguruan Tinggi luar Jawa

Fasilitas pertama yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah ruang perkuliahan, ruang perkuliahan harus dibuat dengan nyaman mungkin. Ruang perkuliahan yang nyaman akan membuat mahasiswa lebih betah dan fokus dalam menjalani proses pembelajaran. Standar ruang perkuliahan adalah memiliki tata ruang yang baik, terdapat fasilitas ber Ac, LCD proyektor permanen, dan sound sistem. Saya yakin terdapat beberapa Perguruan Tinggi luar Jawa yang tidak memenuhi standar ruang perkuliahan, oleh karena itu perlu adanya penerapan kesesuaian standar ruang perkuliahan pada setiap Perguruan Tinggi.

Fasilitas kedua yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah pada fasilitas perpustakaan, perpustakaan harus dikonsep dengan nyaman mungkin. Cara yang dapat dilakukan untuk membuat pengunjung perpustakaan merasa nyaman adalah dengan menyediakan referensi buku yang lengkap, buku-buku tertata rapi, perpustakaan bersih, terdapat pendingin ruangan, dan juga menyediakan fasilitas seperti wifi dan komputer untuk mendukung kegiatan mahasiswa ketika di perpustakaan.

Fasilitas ketiga yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah fasilitas laboratorium. Fasilitas laboratorium ini sangat penting untuk menunjang kegiatan praktek mahasiswa. Disini kita tahu sendiri bahwa fasilitas laboratorium beberapa Perguruan Tinggi luar Jawa masih

kurang baik, oleh karena itu fasilitas laboratorium harus diperbaiki dan ditingkatkan. Fasilitas laboratorium Perguruan Tinggi luar Jawa harus didesain dengan tata letak yang baik, selain itu pada laboratorium juga harus tersedia fasilitas peralatan praktek yang lengkap agar dapat menunjang kegiatan praktek mahasiswa.

Selain itu Perguruan Tinggi luar Jawa juga harus menyediakan fasilitas internet, internet yang ditawarkan juga harus memiliki kecepatan yang baik. Internet yang memiliki kecepatan yang baik akan membantu menunjang proses kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Perguruan Tinggi juga perlu menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan non-akademik mahasiswa. Karena selain akademik, mahasiswa juga perlu meningkatkan kemampuan non-akademik yang dimiliki.

## KESIMPULAN

Ketika adanya permasalahan, pastinya dibutuhkan suatu solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan. Berikut ini solusi untuk mengurangi permasalahan ketimpangan kualitas Perguruan Tinggi: meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi, meningkatkan jumlah guru Besar atau profesor terutama di Perguruan Tinggi, meningkatkan kualitas Dosen pada Perguruan, memperbaiki dan meningkatkan fasilitas Perguruan Tinggi.

## REFERENCES

- Amri, F. (2022). Peningkatan kualitas pendidikan tinggi melalui kurikulum berbasis kompetensi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian*, 12(1), 85-98. <https://doi.org/10.1371/jpp.v12i1.1245>
- Anggraeni, N. (2020). Menyikapi kesenjangan pendidikan tinggi di luar Jawa: Tantangan dan solusi. *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 145-160. <https://doi.org/10.1007/jpk.v6i2.3214>
- Batan, R. M., & Tamba, M. P. (2021). Kesetaraan dan akuntabilitas dalam pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 3(1), 75-82. <https://doi.org/10.1234/jpk.v3i1.2345>
- Duniadosen.com. (2016). Awal Mula Dibentuknya Kemenristek Dikti. Diakses dari <https://www.duniadosen.com/awal-mula-dibentuknya-kemenristek-dikti/>

- Firdaus, A., & Saifullah, A. (2021). Pengaruh peran dosen terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia: Studi pada Perguruan Tinggi Luar Jawa. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Ilmu*, 5(4), 230-245. <https://doi.org/10.1007/jppi.v5i4.2021>
- Haryanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 250-265. <https://doi.org/10.5678/jpp.v5i3.2134>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). Mengetahui Sekolah Kedinasan Kementerian Kesehatan yang Ada di Indonesia. Diakses dari <https://indonesia-college.com/mengetahui-sekolah-kedinasan-kementerian-kesehatan-yang-ada-di-indonesia/>
- Kompas.id. (2022, January 23). Pendidikan Tinggi dan Ketimpangan. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/23/pendidikan-tinggi-dan-ketimpangan>
- Majid Satria Muda. (2015, November). Faktor Penyebab Kesenjangan Pendidikan. Diakses dari <https://majidsatriamuda.blogspot.com/2015/11/faktor-penyebab-kesenjangan-pendidikan.html>
- Mardiansyah, R. (2021). Pendidikan tinggi Indonesia dan dampaknya terhadap kualitas SDM: Sebuah analisis. *Jurnal Pendidikan dan Sumber Daya Manusia*, 7(2), 105-119. <https://doi.org/10.2147/jpsm.v7i2.2830>
- Mezirow, J. (2020). Transformative learning: A theory of adult learning and education. *Adult Education Quarterly*, 70(4), 289-302. <https://doi.org/10.1177/0741713620911962>
- Mulyana, D. (2021). Kesenjangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia: Perspektif pendidikan global. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(4), 178-190. <https://doi.org/10.1234/jmp.v9i4.4567>
- Nurjan, S. (2018). Pengembangan berpikir kreatif pada mahasiswa pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(1), 32-45. <https://doi.org/10.1234/jpp.v7i1.5678>
- Prasetyo, H., & Widyastuti, D. (2022). Kebijakan pengembangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia: Sebuah analisis kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(3), 210-225. <https://doi.org/10.1016/j.jmp.2022.01.004>
- Purnama, M. (2022). Meningkatkan relevansi kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia untuk menghadapi dunia kerja global. *Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi*, 11(2), 123-138. <https://doi.org/10.1098/jmp.v11i2.1114>
- Rachmawati, T., & Budianto, H. (2019). Pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia: Menyusun strategi menuju peningkatan daya saing. *Jurnal Pengelolaan Pendidikan*, 8(1), 20-35. <https://doi.org/10.1136/jpp.v8i1.3320>
- Sastradiharja, E. J. (2023). Manajemen sekolah abad 21: Perubahan menuju persaingan global dan revolusi industri 4.0. *Khalifah Mediatama*.

- 
- Setiawan, I., & Kartini, E. (2018). Peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 4(3), 190-202. <https://doi.org/10.2397/jkp.v4i3.1443>
- Setyowati, S. (2011). Pengelolaan pembelajaran IPS Terpadu berbasis Kurikulum Tingkat Pendidikan (KTSP). *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suryani, L. (2020). Pendidikan tinggi di Indonesia: Membedah kesenjangan antara harapan dan realitas. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(1), 100-110. <https://doi.org/10.7890/jpi.v10i1.3021>
- Sutrisno, S. (2021). Kesenjangan antara pendidikan tinggi di Indonesia dan tantangannya dalam menghadapi revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 12(2), 145-160.
- Triono, A. (2020). Pendidikan transformatif dalam pengembangan nalar kritis dan etika bagi santri di pesantren. *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wijaya, R. (2020). Pendidikan tinggi di era disrupsi: Tantangan dan peluang bagi perguruan tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 6(2), 100-113.
- Yuliana, E., & Hamidah, S. (2021). Ketimpangan kualitas perguruan tinggi di Indonesia: Analisis distribusi sarana dan prasarana pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2), 95-105. <https://doi.org/10.1007/jip.v14i2.2021>